

EDISI : Kamis, 11 April 2019

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :  
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL  
SETDA KABUPATEN BULELENG

Nama Media : *Pos Bali*

Kategori : *PAD*

## Pemkab Buleleng Sewakan Lahan Eks SGO

### ■ Nilai Sewa Ditentukan Tim Appraisal Independen

**BULELENG, POS BALI** - Aset milik Pemkab Buleleng yang merupakan eks mess Sekolah Guru Olahraga (SGO) yang terletak di Jalan Sahadewa dan Jalan Simpang Udayana Singaraja akan dimanfaatkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemungutan sewa.

Kepastian memungut sewa untuk bangunan aset milik Pemkab Buleleng tersebut terungkap saat rapat yang digelar oleh bidang Aset BKD Buleleng di Ruang Rapat BKD Buleleng. Dalam rapat itu, sejumlah calon penyewa yang notabene pemilik bangunan yang berdiri di atas tanah Pemkab Buleleng tersebut diberikan penjelasan terkait besaran sewa.

Kabid Aset BKD Buleleng, Made Pasda Gunawan mengatakan, besaran nilai sewa per tahun itu sudah ditentukan melalui hasil penilaian dari tim appraisal independen. "Untuk lahan yang di Jalan Sahadewa sewanya 46.000 per meter persegi per tahun, kemudian untuk yang di Simpang Udayana karena lokasinya lebih strategis didapatkan hasil 50.000 per meter persegi per tahun," ungkap Pasda Gunawan, Rabu (10/4).

Menurut Pasda Gunawan, nilai sewa tersebut sudah bersifat final dan tidak dapat ditawar lagi.



POS BALI/RIK

**RAPAT digelar Bidang Aset BKD Buleleng untuk membahas kepastian memungut sewa untuk bangunan di lahan milik Pemkab Buleleng.**

Dimana, nilai sewa yang wajib dibayarkan oleh pemilik bangunan di atas lahan tersebut sudah berdasarkan penilaian secara objektif oleh tim yang profesional. "Lahan di dua titik lokasi itu berstatus hak pakai atas nama Pemkab Buleleng. Hak tersebut secara resmi diperoleh tahun 2015, setelah tahun 2005 lalu lahan itu diserahkan kepada Pemkab Buleleng," kata Pasda Gunawan.

Disinggung terkait luas lahan yang disewakan itu, Pasda mengaku, untuk lahan yang berada di Jalan Sahadewa dan Simpang Udayana masing-masing 1.250 meter persegi dan 400 meter persegi. Sedangkan, jumlah pemilik bangunan yang telah menempati lahan tersebut secara keseluruhan sebanyak 10 orang.

Untuk sekedar informasi, lahan tersebut dahulu merupakan milik instansi vertikal Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Bali, yang kemudian dimanfaatkan untuk mess SGO. Memasuki otonomi daerah pada tahun 2005 lahan tersebut diserahkan kepada Pemkab Buleleng.

Sejak saat itu lahan tersebut tidak dimanfaatkan sama sekali oleh pihak Pemkab Buleleng, dan hanya ditempati oleh eks pegawai SGO tanpa ada kompensasi apapun kepada Pemkab Buleleng. "Sejak tahun 2015 bertahap kami lakukan peralihan hak, dulu atas nama SGO menjadi hak pakai atas nama Pemkab (Buleleng). Dan sudah tercatat menjadi aset Pemkab sejak tahun 2015," pungkas Pasda Gunawan.

Saat ini, BKD Buleleng sendiri melalui bidang aset tengah gencar-gencarnya melakukan optimalisasi pemanfaatan aset milik Pemkab Buleleng. Aset-aset yang selama ini dianggap terlantar bakal terus diberdayakan untuk mendapatkan pendapatan daerah. **018**

a Media : **POS BALI**

Kategori : **IMIGRASI**

## Komitmen Berantas KKN, Imigrasi Singaraja Canangkan Zona Integritas WBK dan WBM

**BULELENG, POS BALI** - Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja melakukan deklarasi pencaanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBM), Rabu (10/4). Melalui deklarasi ini Imigrasi Singaraja berkomitmen memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkup kerja Imigrasi Singaraja.

Kepala Kantor Imigrasi Singaraja, Gusti Agung Komang Artawan mengatakan, melalui pencaanangan ini ingin dijadikan momentum sebagai fondasi dasar bagi keberhasilan di tahun 2019 dan untuk mencapai target-target yang disepakati. "Fakta integritas merupakan bagian dari ikhtiar kami untuk terus beintegrasi, bersinergi dan jauh dari korupsi," katanya.

Deklarasi ini juga dihadiri oleh beberapa instansi terkait, termasuk Wakil Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra. Sutjidra berharap agar Kantor Imigrasi Singaraja segera menerapkan pelayanan dengan sistem Digital Melayani (Dilan) untuk melayani pengurusan imigrasi. "Setiap instansi, baik itu instansi vertikal maupun horizontal di Buleleng harus bisa menerapkan



POS BALI/RIK

**DEKLARASI pencaanangan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBM oleh Kantor Imigrasi Singaraja, Rabu (10/4).**

sistem ini. Sistem Dilan akan membawa pelayanan yang cepat, efisien dan sudah barang tentu lebih transparan," katanya.

Terkait dengan pencaanangan ini, Sutjidra kembali berharap agar pelayanan bisa ditingkatkan lagi dan terbebas dari KKN serta menjadi wilayah dengan birokrasi bersih dan melayani. "Mudah-mudahan dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, bisa diterapkan di tempat pengurusan Imigrasi Singaraja," pungkasnya. **018**